



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Demokrasi
Tanggal	: Rabu, 15 Januari 2020
Surat Kabar	: Seputar Indonesia
Halaman	: 3

Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Demokrasi

CANBERRA – Kepercayaan publik saat ini dapat dikatakan merupakan tantangan bagi demokrasi. Menurut Elderman Trust Barometer 2019, masyarakat masih memandang pemerintah dan media sebagai lembaga sosial yang paling tidak dapat dipercaya dibandingkan dengan LSM dan lembaga usaha.

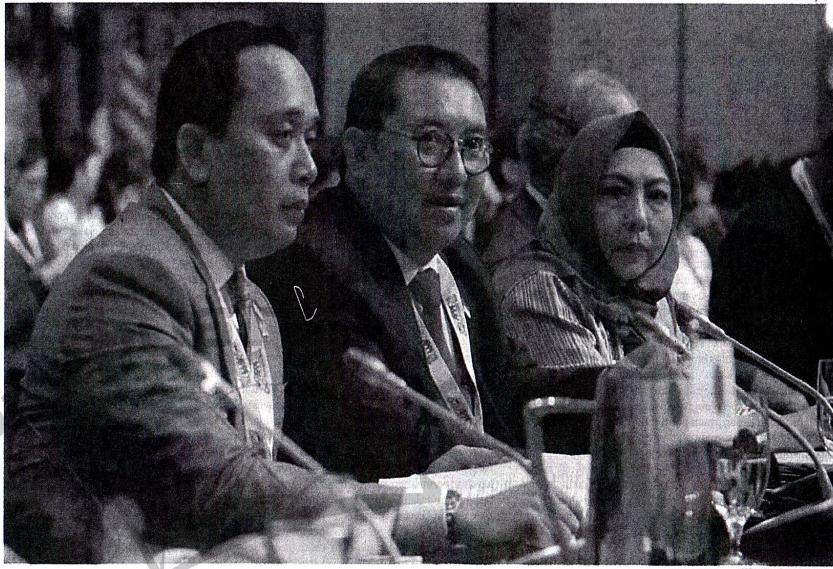
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSA) DPR Fadli Zon mengungkapkan hal tersebut dalam forum tahunan Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 di Canberra, Australia, kemarin. "Mengembalikan kepercayaan publik dan menguatkan integritas adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh kita semua demi meningkatkan standar pelajaran lembaga publik dan melindungi kredibilitas mereka," papar Fadli Zon yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan sidang APPF yang akan berakhir pada Kamis (16/1). Fadli mengungkapkan bahwa semua menyaksikan tuntutan masyarakat di seluruh dunia terus berlaku. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak terjadi demonstrasi publik dan protes di seluruh dunia. Mereka menginginkan perubahan dalam pemerintahan di negara masing-masing.

Setiap gerakan tersebut memiliki alasan tersendiri, mulai kenaikan tarif angkutan umum dan biaya hidup hingga korupsi dan penyaltunguan kekuasaan publik. "Semua ini mengakibatkan kepercayaan publik yang terus menurun dan melemahkan integritas kita," tandas mantan Wakil Ketua DPR ini.

Indonesia percaya bahwa integritas yang lebih kuat adalah kunci untuk mengatasi korupsi dimanapun. Untuk itu, standar integritas haruslah mengandung unsur-unsur sebagaimana termaktub di dalam Komitmen Santiago untuk memerangi korupsi dan memastikan transparansi yang ditarik dalam APEC 2004. Unsur-unsur itu meliputi transparansi yang lebih baik, tata kelola yang lebih berkualitas, dan sistem yang digunakan serta memberikan informasi transparan menge-

DWI SASONGKO
Laporan
Wartawan
SINDO/Media
Canberra



Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSA) DPR Fadli Zon (tengah) didampingi Wakil Ketua BKSA Putu Supadma Rudana (kiri) dan anggota DPR Himmatul Aliyah (kanan) saat hadir dalam forum tahunan Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 di Canberra, Australia, kemarin.

tras, yang menuntut agar DPR menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel," tuturnya. Melalui data yang disajikan, platform ini juga dapat membantu verifikasi terhadap ketepatan dan akurasi informasi yang mungkin diberitakan secara ambigu di platform daring/media sosial.

Menurut Fadli, ke depan, sebagian besar legislasi elektronik sebagi sarana partisipasi publik untuk menjadikan proses pembuatan kebijakan lebih inklusif dan terbuka bagi keluarga besar masyarakat. "Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah penguatan integritas berarti juga mendorong transparansi untuk menutup peluang penyalahgunaan badan hukum manusia untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penghindaran pajak, dan korupsi," ujarnya.

Fadli melanjutkan, pada 2018, DPR mengambil bagian dalam penyusunan langkah-langkah keterbukaan parlemen melalui Rencana Aksi Keterbukaan Parlemen. Terdapat beberapa aksi yang dilaksanakan melalui peluncuran Sistem Informasi Legislatif (Sileg 2.0) yang lebih mudah dan nyaman digunakan serta memberikan informasi transparan menge-

men (BKSA) DPR Putu Supadma Rudana mengajukan tiga rekomendasi. Di antaranya legislasi nasional harus dibangun berdasarkan budaya damai sebagai upaya ikut memajukan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Di mana, produk hukum yang tercipta harus berkontribusi membangun, menumbuhkan, dan membina perdamaian itu sendiri.

Rekomendasi kedua, perlunya fokus di dalam legislasi nasional yang mendukung implementasi efektif tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, dan terakhir tentang kesadaran dan penurunan kesenjangan antarnegara di kawasan. "Satu lagi, dibutuhkan legislasi nasional yang bisa menjadi dasar bagi implementasi efektif berbagai komitmen internasional mengenai perdamaian dan keamanan, yang sejalan dengan prioritas dan kerangka hukum nasional," kata Putu.

terkait Peraturan PBB. Putu Supadma Rudana mengajukan tiga rekomendasi. Di antaranya legislasi nasional harus dibangun berdasarkan budaya damai sebagai upaya ikut memajukan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Di mana, produk hukum yang tercipta harus berkontribusi membangun, menumbuhkan, dan membina perdamaian itu sendiri.

Keterlibatan semua negara APPF adalah wadah untuk mencari titik temu persepsi terhadap isu-isu keamanan yang sedang mengemuka. "Melalui dialog dalam pertemuan ini, saya percaya kita mampu menguakkan diplomasi parlemen sebagai cara penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan, juga sangat penting Anggota parlemen bisa berkontribusi pada arsitektur perdamaian dan keamanan."

Sementara itu, pada situasi pascakonflik, parlemen bersama dengan pemerintah memainkan peran penting mempertahankan perdamaian dan menyediakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. "Pada skala yang lebih luas, keberadaan parlemen dalam hal ini turut melindungi prinsip inklusivitas di dalam demokrasi," paparnya.

Selain itu, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB saat ini, Indonesia hendak mendorong pendekatan yang komprehensif dan holistik terhadap diplomasi global. "Kami berkomitmen menjadi mitra setia bagi perdamaian dunia dengan kesta-

dasawarsa terakhir, Asia Pasifik tumbuh menjadi kawasan yang relatif damai dan stabil. Namun demikian, keadaan ini tidak belum memenuhi terlebih.

Selain itu, pada situasi pascakonflik, parlemen bersama dengan pemerintah memainkan peran penting mempertahankan perdamaian dan menyediakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. "Pada skala yang lebih luas, keberadaan parlemen dalam hal ini turut melindungi prinsip inklusivitas di dalam demokrasi," paparnya.

Pada akhirnya, mengungkapkan, perdamaian dan keamanan adalah dua komponen yang amat penting dalam menjaga kesta-